

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Djarmika Sastra dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Djarmika Sastra, Marsono. 1990, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Ghufron Ahmad, Sudarsono, 1990, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, P.T Melton Putra, Jakarta
- Handayani Soewarna, 1999, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta
- Hartini Sri dan Setiajeng Kadarsih, 2004, *Diktat Hukum Kepegawaian*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Kansil C.S.T, 1979, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Kusnardi Moh, Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Manan Bagir, *Menegakan Hukum Suatu pencarian*, Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia, 2009;
- Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta
- Muhammad Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Musanef, *Menejemen Kepegawaian Di Indonesia*, 1984, Gunung Agung, Jakarta,
- Poerwadarminta W.J.S, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

- Ranawijaya Usep, 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*. Balai Aksara, Jakarta
- Rudy, 2013, *Konstitualisme Indonesia Buku I Dasar dan Teori*, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung
- S.f Marbun dan M. Mahfud MD, pokok-pokok Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta; 1987, hlm 98-99
- Sri Hartini, kadarsih setiajeng, sudrajat tedi. 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar grafika. Jakarta
- Sukarja Ahmad, 2012, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945*, Sinar Grafika, Jakarta
- Thoha Mifta, 2012, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Tjokroamidjojo Bintoro, 1995, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, P.t. Pustaka LP3ES Indonsia, Jakarta
- Widjaja. A.W, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) ,dan pasal 28 D ayat (2).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pasal 2 ayat (3) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1976 dan surat edaran kepala Badan kepegawaian nomor 03/SE/1976

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 adalah tenaga teknis yang bersifat operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok instansi dan bukan tenaga teknis administrasi.

Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri yang Menjadi Bakal Calon Anggota DPE,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu.